

Analisis Framing Media Digital Terhadap Pemberitaan Demonstrasi di Indonesia

Noni Nurjanah¹ & Sutrisno²

Universitas Pasundan^{1&2}

Email Korespondensi: noni.238080023@mail.unpas.ac.id

Abstrak

Fenomena demonstrasi besar di Indonesia pada Agustus - September 2025 dipicu oleh kenaikan tunjangan DPR menjadi bukti nyata bagaimana media digital membingkai informasi. Kondisi ini diperkuat oleh langkah pemerintah yang membatasi akses media sosial melalui penghentian layanan TikTok Live serta sensor terhadap konten di Instagram dan YouTube. Akibatnya, publik hanya menerima pemberitaan dari media digital yang menonjolkan informasi kerusuhan dan ancaman keamanan, sementara ruang komunikasi terkait tuntutan masyarakat dihilangkan. Tujuan penelitian ini untuk menguraikan pola framing yang digunakan media serta menjelaskan konsekuensinya terhadap demokrasi. Penelitian ini menggunakan teori framing Robert N. Entman yang menekankan empat fungsi utama framing, yaitu pendefinisian masalah, diagnosis penyebab, penilaian moral, dan rekomendasi solusi. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif melalui studi dokumentasi pemberitaan media digital dan media sosial terkait demonstrasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa framing media menempatkan demonstrasi sebagai tindakan anarkis yang mengancam ketertiban, dengan demonstrasi diposisikan sebagai penyebab kerusuhan. Pemerintah memperkuat narasi ini dengan pembatasan media sosial, sehingga ruang komunikasi publik menyempit dan suara kritis sulit terdengar. Kesimpulannya, framing media digital dan pembungkaman media sosial tidak hanya menciptakan persepsi publik yang timpang, tetapi juga berpotensi mengikis kebebasan berekspresi dan melemahkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Kata kunci: Framing Media, Robert N. Entman, Kebebasan Komunikasi.

Abstract

The phenomenon of large demonstrations in Indonesia in August-September 2025, triggered by an increase in DPR allowances, is clear evidence of how digital media frames information. This situation was exacerbated by the government's decision to restrict access to social media by suspending TikTok Live services and censoring content on Instagram and YouTube. As a result, the public only received news from digital media that highlighted information about riots and security threats, while the space for communication related to public demands was eliminated. The purpose of this study is to describe the framing patterns used

by the media and explain their consequences for democracy. This research uses Robert N. Entman's framing theory, which emphasizes four main functions of framing, namely problem definition, diagnosis of causes, moral assessment, and solution recommendations. The method used is descriptive qualitative research through a study of digital media and social media coverage related to the demonstrations. The results of the analysis show that media framing positions the demonstrations as anarchic acts that threaten order, with the demonstrators positioned as the cause of the riots. The government reinforced this narrative by restricting social media, thereby narrowing the space for public communication and silencing critical voices. In conclusion, digital media framing and social media silencing not only create a skewed public perception but also have the potential to erode freedom of expression and weaken the quality of democracy in Indonesia.

Keywords: Media Framing, Robert N. Entman, Freedom of Communication.

PENDAHULUAN

Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari satu pihak kepada pihak lain dengan tujuan untuk menciptakan pemahaman yang sama (Sari et al., 2024). Di era digital, media digital menjadi sarana utama dalam menyebarkan informasi karena mampu menjangkau masyarakat secara luas dan cepat. Melalui media digital, pesan dapat diproduksi, dipublikasikan, dan diakses secara masif hanya dalam hitungan detik (Zuniananta, 2020). Hal ini membuat masyarakat lebih mudah mengetahui peristiwa yang sedang terjadi, termasuk isu-isu sosial maupun politik. Namun, cara penyampaian pesan dalam media digital tidak pernah netral sepenuhnya, karena informasi dapat dibentuk sesuai kepentingan tertentu. Proses pembentukan pesan inilah yang kemudian dikenal dengan istilah framing (Nurhayati & Laksmi, 2023).

Framing adalah cara media memilih, menonjolkan, dan menekankan aspek tertentu dari suatu peristiwa sehingga memengaruhi cara pandang publik. Dalam media digital, framing sangat kuat karena pesan yang ditampilkan sering kali dibungkus dengan judul menarik, gambar provokatif, dan susunan cerita yang dapat menggiring opini (Angin & Surbakti, 2024). Misalnya, sebuah peristiwa bisa ditampilkan sebagai aksi heroik atau justru anarkis, tergantung pada bagaimana media meramunya. Pola framing ini menjadi salah satu alasan mengapa media digital tidak sekadar menyampaikan fakta, melainkan juga membentuk persepsi masyarakat. Akibatnya, informasi yang diterima publik sering kali sudah melalui proses penyaringan dan penekanan tertentu (Pitono & Dharmawan, 2025).

Fenomena demonstrasi di Indonesia beberapa bulan terakhir memperlihatkan bagaimana framing media digital bekerja. Banyak pemberitaan lebih menonjolkan kericuhan, bentrokan, atau aksi pembakaran fasilitas umum, sehingga masyarakat lebih mengenal demonstrasi sebagai tindakan anarkis. Padahal, tuntutan yang menjadi alasan demonstrasi sering

kali tenggelam di balik narasi tersebut. Ketika media lebih memilih menekankan sisi kerusuhan, publik cenderung melihat demonstrasi bukan sebagai ruang penyampaian aspirasi, melainkan ancaman bagi keamanan. Gambaran inilah yang akhirnya membentuk cara masyarakat menilai aksi massa secara umum (Iriansyah, 2025).

Untuk meredam dampak dari narasi demonstrasi yang dianggap anarkis, pemerintah biasanya melakukan intervensi terhadap media digital. Salah satu caranya adalah dengan mendorong pemberitaan yang menekankan sisi keamanan dan ketertiban. Selain itu, pemerintah juga kerap melakukan pembatasan akses pada beberapa platform media sosial dengan alasan mencegah penyebaran hoaks atau provokasi. Melalui langkah ini, arus informasi dapat dikendalikan agar tidak semakin memicu kericuhan. Pada dasarnya, strategi ini adalah bentuk framing dari pihak pemerintah untuk menjaga stabilitas situasi.

Framing yang dilakukan pemerintah membawa dampak ganda bagi masyarakat. Di satu sisi, langkah tersebut bisa membantu mencegah penyebaran isu-isu yang berpotensi menimbulkan kekacauan. Namun, di sisi lain, pembatasan informasi sering kali menimbulkan kesan adanya pembungkaman media. Hal ini membuat suara masyarakat yang berbeda atau kritis menjadi sulit terdengar di ruang publik. Kondisi ini dapat menimbulkan kecurigaan bahwa pemerintah lebih mementingkan menjaga citra daripada memberikan informasi yang seimbang. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap media maupun pemerintah bisa menurun (Nelwan et al., 2023).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Iriansyah, 2025) menunjukkan bahwa dalam pemberitaan demo mahasiswa, media lebih banyak menekankan sisi keamanan dan kerusuhan, sementara tuntutan massa jarang diangkat. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam penyajian informasi. Sementara itu, penelitian oleh (Apriyani, 2021) menemukan bahwa pembatasan media sosial selama aksi demonstrasi mengurangi akses masyarakat terhadap informasi alternatif. Akibatnya, masyarakat sulit mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai alasan di balik demonstrasi. Penelitian lainnya oleh (Ningrat & Nulhaqim, 2023) menekankan bagaimana pemerintah menggunakan kontrol teknologi komunikasi untuk mengelola opini publik. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa langkah tersebut sering kali berujung pada pembungkaman suara kritis di media digital. Ketiga penelitian ini secara umum memperlihatkan bahwa *framing* media dan pembatasan informasi berkontribusi pada terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi yang beragam. Akibatnya, kebebasan berekspresi dan kualitas demokrasi menjadi terancam.

Sudah banyak penelitian yang membahas pembatasan media sosial yang dilakukan pemerintah. Adapun alasan pembatasan media sosial yang dilakukan oleh pemerintah karena menjaga keamanan dan ketertiban umum, pencegahan penyebaran hoaks dan konten provokatif, mencegah adanya

eskalasi kejahatan, serta penertiban konten berbahaya. Pemerintah berargumen pembatasan dilakukan untuk menjaga keamanan nasional dan ketertiban umum. Meminimalisir penyebaran berita hoaks yang bersifat hasutan, karena berita tersebut nantinya dapat memperburuk kondisi di lapangan. Pada penelitian ini menawarkan sudut pandang yang lebih menekankan pada konteks framing yang mengarah pada pembungkaman media digital oleh pemerintah. Fokus ini penting karena belum banyak penelitian yang secara langsung menghubungkan framing pemerintah dengan strategi untuk meredam demonstrasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut dan memberikan gambaran baru mengenai praktik komunikasi politik di Indonesia.

Alasan peneliti melakukan penelitian ini untuk melihat lebih jauh bagaimana framing pemerintah dalam media digital memengaruhi pemberitaan demonstrasi. Penting untuk dipahami bahwa media tidak hanya menjadi perantara informasi dan media komunikasi, tetapi juga arena tarik-menarik kepentingan. Dengan memahami pola framing pemerintah, kita dapat melihat dampaknya terhadap kebebasan media serta ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang utuh. Penulisan paper ilmiah ini juga menjadi langkah awal untuk menelaah lebih kritis peran media digital dalam peristiwa politik di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dua rumusan masalah yang telah dirumuskan. Pertama, memberikan pemahaman mengenai pola framing yang dilakukan pemerintah dalam pemberitaan demonstrasi. Kedua, menguraikan dampak framing tersebut terhadap kebebasan media dan ruang komunikasi masyarakat. Dengan tujuan ini, penelitian diharapkan dapat memberi gambaran lebih jelas mengenai dinamika antara pemerintah, media, dan masyarakat dalam situasi demonstrasi.

Penelitian ini memiliki manfaat praktis dan teoritis. Secara praktis, hasil penelitian dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi komunikasi publik yang tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga menghargai kebebasan berekspresi. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menambah literatur mengenai framing media digital dan praktik pembungkaman media yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi aksi demonstrasi. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya dalam bidang komunikasi politik. Rumusan masalah dalam penelitian ini dibagi menjadi dua. Pertama, bagaimana framing pemerintah melalui media digital membentuk narasi pemberitaan demonstrasi? Kedua, bagaimana dampak dari framing tersebut terhadap kebebasan media dan ruang komunikasi masyarakat? Kedua pertanyaan ini akan menjadi dasar analisis yang dibahas dalam penelitian ini.

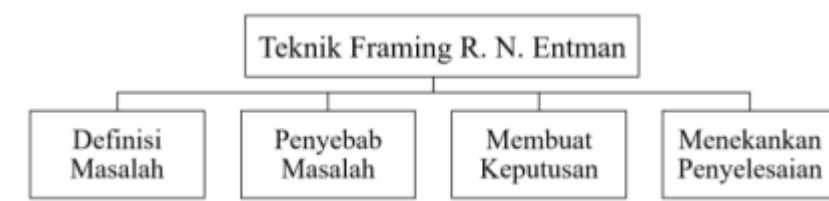
KERANGKA TEORI

Teori Framing

Teori framing Robert N. Entman memberikan kerangka kerja penting dalam menganalisis bagaimana media menyusun sebuah berita agar memiliki kekuatan naratif yang dapat memengaruhi pandangan publik. Konsep ini menegaskan bahwa setiap berita tidak pernah sepenuhnya netral, karena media selalu melakukan seleksi fakta, menonjolkan aspek tertentu, serta mengabaikan bagian lain sesuai dengan kepentingan ideologi maupun politik. Sehingga, framing menjadi konsep nyata yang berfungsi bukan hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk membentuk cara masyarakat memahami realitas sosial dan politik

Framing Robert N. Entman memberikan kerangka kerja penting dalam menganalisis bagaimana media menyusun sebuah berita agar memiliki kekuatan naratif yang dapat memengaruhi pandangan publik. Teknik ini menjelaskan bahwa dalam proses *framing*, media melakukan empat hal utama, yaitu menentukan masalah spesifik (*define a specific problem*), mendiagnosis penyebab masalah (*diagnose a cause of the problem*), memberikan penilaian moral (*make a moral judgment about the problem*), dan menyarankan solusi (*suggest remedies to the problem*). Keempat elemen tersebut bekerja sama membentuk sebuah bingkai berita yang tidak hanya sekadar menyampaikan informasi, melainkan juga mengarahkan interpretasi dan opini masyarakat sesuai dengan kepentingan media (Nurhayati & Laksmi, 2023). Sehingga, teknik *framing* bukan hanya soal bagaimana berita dikemas, tetapi juga bagaimana fakta-fakta dipilih dan dihubungkan satu sama lain untuk menciptakan narasi yang kuat dan bermakna.

Gambar 1. Teknik Framing R.N.Entman



Sumber: (Nurhayati & Laksmi, 2023)

Dalam konteks media digital, mekanisme framing tidak hanya hadir dalam pemberitaan media online, tetapi juga dalam algoritma platform yang memengaruhi visibilitas isu di ruang publik digital. Hal ini menunjukkan bahwa teori framing tetap relevan, tetapi mengalami perluasan ranah penerapan. Menurut Muzakkir (2021), konsep nyata dari analisis framing juga berguna untuk membedah ideologi dan strategi media dalam menyajikan berita. Melalui teknik ini, dapat dipahami bagaimana media memilih, merangkai, dan menonjolkan fakta agar berita menarik, mudah diingat, sekaligus menggiring pemahaman publik sesuai perspektif media. Hal ini

mengungkap bahwa pemberitaan tidak netral, melainkan sarat dengan penataan cerita yang dapat menguntungkan pihak tertentu. Dengan menyadari konsep nyata ini, audiens didorong untuk lebih kritis terhadap pesan media. Selain itu, Sukmawati (2023) menambahkan bahwa analisis framing meliputi empat konsep nyata lain yang penting, yaitu pendefinisian masalah, identifikasi aktor atau protagonis penyebab masalah, penilaian moral, serta solusi atau rekomendasi penyelesaian. Elemen-elemen ini menegaskan bahwa framing tidak hanya menggambarkan peristiwa, tetapi juga memproduksi makna dan nilai bagi pembaca.

Penggunaan teori framing R. N. Entman sebagai konsep nyata dalam penelitian ini sangat sesuai dengan judul dan tujuan penulisan paper ilmiah ini, yakni melihat bagaimana media digital membingkai pemberitaan demonstrasi di Indonesia. Teori ini memberikan alat analisis sistematis untuk memahami bagaimana media cenderung menekankan kerusuhan dan menutupi konteks sosial dari demonstrasi. Dengan demikian, teori framing digunakan agar penelitian ini tidak hanya menjelaskan proses komunikasi, tetapi juga menunjukkan bagaimana praktik jurnalistik membentuk opini publik. Melalui perspektif ini, penulis berharap membuka ruang diskusi kritis terkait keterbatasan komunikasi masyarakat akibat framing media yang berat sebelah serta intervensi pemerintah dalam mengendalikan informasi selama demonstrasi di Indonesia.

Menurut Lim (2024), tentang politik media sosial di Asia Tenggara semakin mempertegas bahwa negara-negara dengan penetrasi internet tinggi dan sistem politik yang masih berproses menuju demokrasi cenderung mengalami “perang framing” antara media arus utama, pemerintah, dan wacana alternatif di media sosial. Dengan demikian, menempatkan Indonesia dalam kerangka perbandingan regional akan memperkaya pemahaman tentang bagaimana media digital tidak hanya melaporkan demonstrasi, tetapi juga secara aktif membentuk cara publik memaknai aksi-aksi tersebut.

Media Digital

Menurut (Fadila et al., 2021), media digital adalah sarana komunikasi berbasis teknologi informasi yang memungkinkan pesan diproduksi, dipublikasikan, dan diakses secara masif dalam waktu singkat. Sementara itu, (Ulfia et al., 2024) menjelaskan bahwa media digital merupakan platform komunikasi modern yang tidak hanya berfungsi menyebarkan informasi, tetapi juga memberikan ruang interaksi dua arah antara pengirim dan penerima pesan. Dari dua pengertian ini, dapat dipahami bahwa media digital memiliki karakteristik utama berupa kecepatan, jangkauan luas, serta kemampuan interaktif yang membedakannya dari media konvensional.

Media digital dalam praktiknya sering digunakan untuk menyampaikan isu-isu sosial maupun politik yang berkembang di masyarakat. Kecepatan arus informasi memungkinkan publik dengan mudah mengikuti perkembangan peristiwa, termasuk demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah. Namun,

penyajian berita melalui media digital tidak sepenuhnya bersifat netral karena setiap pesan dapat dibentuk sesuai kepentingan tertentu. Framing yang dilakukan media, misalnya dengan menekankan sisi kerusuhan dan kekacauan, membuat masyarakat lebih mengenal demonstrasi sebagai tindakan anarkis daripada ruang penyampaian aspirasi. Dengan demikian, media digital memiliki peran besar dalam membentuk persepsi publik melalui pilihan narasi yang ditampilkan (Kamelia & Nusa, 2018).

Demonstrasi

Demonstrasi merupakan suatu bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara kolektif oleh kelompok masyarakat dengan tujuan menyuarakan aspirasi, protes, atau tuntutan terhadap kebijakan maupun kondisi tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, demonstrasi merupakan salah satu hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi sebagai wujud partisipasi dalam kehidupan demokrasi. (Pitono & Dharmawan, 2025) menjelaskan bahwa demonstrasi tidak hanya menjadi sarana protes, tetapi juga ruang komunikasi politik antara masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian, demonstrasi dapat dipahami sebagai ekspresi kebebasan berpendapat yang sah, meskipun dalam praktiknya sering kali dipersepsikan berbeda tergantung pada cara pemberitaan dan bingkai media yang digunakan.

Menurut Tufekci (2017), media sosial mampu mempercepat proses koordinasi, menyebarkan informasi secara real-time, dan membangun solidaritas lintas kelompok. Namun, ia juga menekankan kerentanannya, seperti mudahnya gerakan digital direpresi melalui sensor atau disinformasi yang tersebar di platform daring. Hal ini relevan untuk melihat bagaimana framing media digital membentuk persepsi terhadap demonstrasi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu merupakan pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat suatu fenomena atau kejadian yang sedang diteliti. Penelitian jenis ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang konteks dan proses suatu peristiwa tanpa menggunakan metode kuantitatif atau statistik (Waruwu, 2023). Dalam penulisan paper ilmiah media digital dan *framing* pemberitaan demonstrasi ini, metode deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengamati, menganalisis, dan mengevaluasi isi berita secara detail sehingga dapat mengetahui bagaimana media membentuk narasi dan opini publik melalui framing yang dilakukan.

Dalam penelitian ini, metode kualitatif memberi ruang bagi peneliti untuk mendalami setiap unsur dan strategi yang dipakai dalam pemberitaan,

termasuk seleksi fakta, penyajian berita, dan makna yang terkandung di dalamnya. Data diperoleh melalui studi dokumentasi dan sumber berita media digital utama yang membahas demonstrasi, kemudian dianalisis dengan teknik framing Robert N. Entman. Pendekatan ini memperlihatkan bagaimana berita diberi bingkai tertentu sebagai strategi komunikasi yang tidak hanya menyajikan fakta namun juga membentuk persepsi masyarakat terhadap demonstrasi sebagai suatu peristiwa sosial politik (Nurrisa et al., 2025).

PEMBAHASAN

Pada tahun 2025, Indonesia diguncang oleh demonstrasi besar yang berawal dari penolakan masyarakat terhadap kenaikan tunjangan gaji anggota DPR serta tindakan para anggota DPR yang berjoget dan diduga bersuka cita atas kenaikan gaji sebesar tiga juta per hari dan tunjangan rumah, di tengah kondisi ekonomi sulit yang dialami masyarakat. Aksi demonstrasi berlangsung di banyak kota, mulai dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, hingga Makassar. Ribuan orang, termasuk mahasiswa dan *public figure*, turun ke jalan dengan membawa berbagai spanduk dan seruan agar DPR membatalkan keputusan tersebut. Suasana awalnya berjalan damai dan kondusif, di mana masyarakat hanya membacakan tuntutan di depan gedung DPR. Namun, pada hari-hari berikutnya situasi berubah menjadi kericuhan besar yang menimbulkan kerugian di banyak sektor.

Kerusuhan terjadi di berbagai titik, diantaranya Gedung DPR daerah menjadi sasaran kemarahan massa, beberapa di antaranya dibakar hingga rata dengan tanah. Rumah para pejabat, termasuk rumah menteri dan anggota DPR, dijarah oleh kelompok-kelompok yang memanfaatkan suasana kacau. Tidak hanya itu, fasilitas umum juga hancur akibat bentrokan antara aparat keamanan dengan massa. Di beberapa kota, transportasi lumpuh karena jalan utama diblokade, dan toko-toko terpaksa tutup untuk menghindari penjarahan.

Gambar 2 dan 3 Demo ricuh di Unisba dan Unpas



Home > News > Jawa Barat

Rektor Unisba: Keributan di Kampus Tamansari Disusupi Gerombolan Tak Dikenal

02 Sep 2025, 12:14 WIB



Massa bertahan di sekitar kampus setelah aksi demo berakhir, memicu keributan di beberapa titik di Bandung.

Ada kemungkinan mahasiswa Unisba terlibat dalam keributan, namun rektor memastikan tidak dilakukan oleh kelompok mahasiswa.

Tidak ada aparat TNI dan Polri yang masuk ke area kampus saat keributan terjadi, hanya demonstran yang disebut melakukan sweeping ke area kampus.

Sumber : (Kompas.com, 2025) dan (JABAR, 2025)

Di Bandung, kerusuhan ini berdampak langsung pada dunia pendidikan. Universitas Islam Bandung (UNISBA) dan Universitas Pasundan (Unpas) yang letaknya tidak jauh dari titik aksi, ikut terkena imbas. Aktivitas perkuliahan terhenti karena lingkungan kampus tidak lagi aman. Banyak mahasiswa yang ketakutan karena gedung kampus sempat dilempari batu, bahkan beberapa ruangan mengalami kerusakan. Suasana mencekam membuat mahasiswa harus dievakuasi dan diarahkan pulang lebih cepat. Selain kerugian materi berupa kerusakan fasilitas kampus, mahasiswa juga mengalami trauma. Mereka yang sehari-hari datang untuk belajar kini menghadapi situasi penuh asap, teriakan, dan bentrokan yang mengganggu mental serta konsentrasi mereka.

Pemberitaan mengenai demonstrasi ini tersebar luas melalui media digital. Portal berita besar di Indonesia seperti Kompas.com, Detik.com, dan Tempo.co menjadikannya sebagai berita utama. Namun, sudut pemberitaan yang diangkat kebanyakan lebih menekankan pada kerusuhan dan aksi kekerasan. Judul-judul berita dipenuhi dengan kata-kata keras seperti "Kerusuhan Meluas," "Gedung DPRD Dibakar," atau "Deretan Aksi Penjarahan." Liputan semacam ini membuat masyarakat yang membaca berita lebih terfokus pada gambaran kerusuhan dibanding memahami alasan mengapa masyarakat sampai turun ke jalan.

Gambar 4 dan 5 Deretan aksi penjarahan rumah DPR dan Bakar Gedung DPRD

Deretan Aksi Penjarahan di Rumah Anggota DPR, Massa Ambil Barang Elektronik hingga Kucing

Tayang: Minggu, 31 Agustus 2025 13:53 WIT | Diperbarui: Selasa, 2 September 2025 12:33 WIT



RUMAH SAHRONI - Massa menjarah rumah Anggota DPR RI Ahmad Sahroni, di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (30/8/2025). Berikut deretan aksi penjarahan di rumah sejumlah anggota DPR RI yang terjadi Sabtu (30/8/2025) hingga Minggu (31/8/2025) di sini hari.

Penjarah terjadi di rumah Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio, hingga Nafa Urbach.

Rumah sejumlah anggota DPR ini menjadi sasaran kemarahan massa lantaran dinilai tak simpatik saat menanggapi kritik publik.

Massa Demo Bakar Gedung DPRD Makassar, 3 Orang Tewas



Foto: Kantor DPRD Makassar dibakar massa. (Sahrul Alim/detikSulsel)

Makassar - Aksi demonstrasi di Makassar berujung pembakaran gedung DPRD Makassar. Akibat pembakaran itu, 3 orang meninggal dunia, sementara 5 lainnya luka-luka.

Plt Kepala Pelaksana BPBD Makassar M Fadli Tahar menjelaskan, tiga korban yang meninggal dunia terdiri dari 2 orang pria dan seorang wanita. Dua korban meninggal saat sudah dibawa ke rumah sakit.

"Meninggal 3 orang," ujar Fadli melansir **detikSulsel**, Sabtu (30/8/2025). Sementara lima korban luka-luka dari 3 orang luka berat, dan 2 lainnya luka sedang. Para korban masih menjalani perawatan.

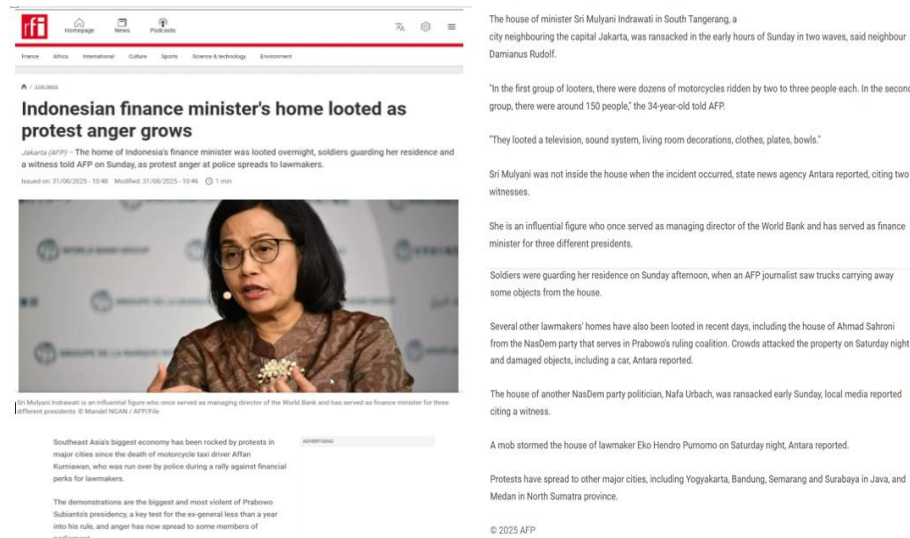
"Ini data terakhir, anggota masih asesmen," sambungnya.

Sumber : (Kompas.com, 2025), (Mappiwali, 2025)

Media online Kompas.com memberikan laporan detail tentang penjarahan yang terjadi di Jakarta dan Bandung, lengkap dengan foto-foto warga yang membawa barang dari rumah pejabat. Detik.com bahkan mengunggah video pembakaran Gedung DPR di Makasar, yang kemudian viral karena memperlihatkan kobaran api besar dan kepanikan warga sekitar. Sementara itu, Kaltimpost.com dan Wartakotalive.com juga mengulas ketegangan antara aparat dan massa di jalan-jalan utama. Dari semua liputan ini, yang muncul ke permukaan adalah citra demonstrasi sebagai tindakan anarkis, padahal inti tuntutan yaitu penolakan kenaikan tunjangan DPR hampir tidak mendapatkan ruang pemberitaan yang luas.

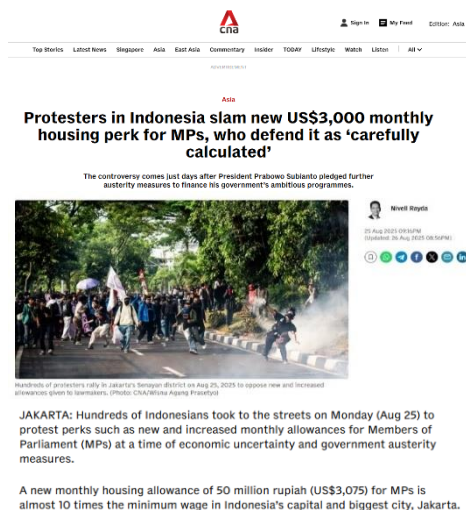
Pemberitaan tidak berhenti di dalam negeri saja, karena media internasional seperti RFI.com, CAN.com, Reuters.com juga ikut menyoroti demonstrasi di Indonesia. Judul yang digunakan menggambarkan kondisi negara sedang tidak stabil dengan adanya penjarahan ke rumah menteri keuangan, sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan pembaca luar negeri. Narasi ini sejalan dengan strategi pemerintah dalam membatasi ruang gerak media. Liputan media diarahkan agar hanya menyoroti kerusakan di beberapa titik, sementara aksi damai di tempat lain jarang disorot. Dengan demikian, seolah-olah keseluruhan demonstrasi identik dengan tindakan anarkis, sementara suara masyarakat yang menuntut keadilan hampir tenggelam.

Gambar. 6 Indonesian finance minister's home looted as protest anger grows



Sumber : (RFI.com, 2025)

Gambar 7. Prosters in Indonesia



Sumber : (Channelnewsasia.com, 2025)

Melihat tindakan pemerintah tersebut, masyarakat berusaha menyiarkan kondisi sebenarnya di lapangan melalui fitur TikTok Live dengan harapan pemberitaan menjadi lebih berimbang. Banyak video menampilkan aksi damai, solidaritas mahasiswa, hingga tindakan aparat dalam membubarkan massa. Namun, pemerintah mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan layanan TikTok Live streaming pada tanggal 15 hingga 20 Agustus 2025, tepat pada masa puncak demonstrasi. Keputusan ini membuat siaran langsung yang biasanya memberi gambaran utuh tentang situasi di

lapangan tiba-tiba menghilang. Akibatnya, publik kembali bergantung pada pemberitaan media arus utama yang lebih banyak menyoroiti kerusuhan.

Gambar 8. Tiktok Live diblokir saat Demo

TikTok Live Diblokir Saat Demo, Ini Upaya Pembungkaman Ekspresi Publik

Pemerintah mencoba membungkam ekspresi publik dengan dalih moderasi konten dan mencegah disinformasi. Ini membatasi narasi politik publik, bukan mendorong kepentingan publik. Pemerintah harusnya mengutamakan transparansi dan perlindungan terhadap kebebasan pers.

La Ode Rifaldi Nedan Prakasa

Gejolak politik Indonesia saat ini memicu gelombang ekspresi publik di ruang digital. Publik mengekspresikan kekecewaan di media sosial, termasuk TikTok, atas kebijakan fantastisnya nilai gaji dan tunjangan anggota DPR.

Hal yang bertolak belakang dengan kondisi masyarakat yang sulit mendapatkan pekerjaan dengan upah yang layak. Puncaknya, ada aksi represif aparat yang menewaskan masyarakat sipil.

Sayangnya, alih-alih memberikan transparansi dan membuka ruang diskusi dengan masyarakat, pemerintah mencoba membungkam ekspresi publik dengan dalih "moderasi konten" dan mencegah disinformasi.

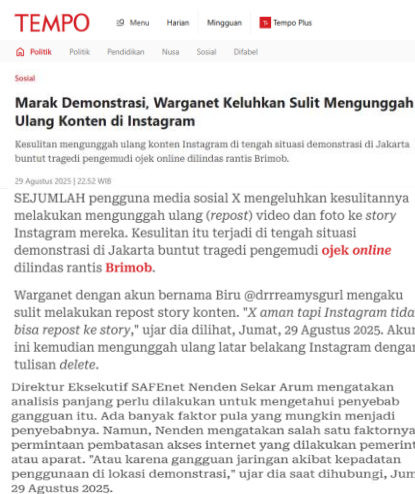
Pada bulan Agustus, Kementerian Komunikasi dan Digital (komdigi) memang sempat menghubungi sejumlah perwakilan platform media sosial seperti TikTok dan Meta dan berencana akan memanggil mereka ke Jakarta.

Tak lama setelah itu, pihak TikTok Indonesia mengakui membekukan sementara fitur live streaming. Alhasil tidak ada laporan jurnalisisme warga terkait kondisi terkini langsung yang terjadi di lapangan.

Sumber : (M. A. Sari, 2025)

Selain TikTok, platform lain juga ikut terkena pembatasan. Instagram mengalami sensor terhadap unggahan yang berkaitan dengan demonstrasi, terutama konten video yang memperlihatkan aksi di lapangan. Beberapa akun yang aktif melaporkan situasi demo bahkan diblokir secara sepihak. Hal yang sama juga terjadi pada YouTube, di mana video-video demonstrasi yang tidak sesuai dengan narasi resmi dihapus. Banyak aktivis dan jurnalis independen mengaku akun mereka hilang atau tidak bisa lagi digunakan karena dianggap menyebarkan informasi yang mengganggu ketertiban.

Gambar 9. Dan 10. Marak Demonstrasi Warganet keluhkan sulit mengunggah konten di Instagram



Sumber: (Tempo.co, 2025) dan (Kompas.com, 2025)

Tindakan pemerintah ini menimbulkan kesan bahwa ada upaya untuk menutup suara rakyat di dunia maya. Bagi sebagian besar masyarakat, pembungkaman media sosial ini terasa seperti taktik agar publik hanya menerima satu versi cerita: versi resmi yang sejalan dengan kepentingan pemerintah. Sementara itu, suara dari lapangan yang mencoba menggambarkan alasan sebenarnya dari demonstrasi menjadi semakin sulit ditemukan.

Jika dilihat dari sudut komunikasi, peristiwa ini menunjukkan betapa besar peran media digital dalam membentuk cara masyarakat memahami suatu kejadian. Media massa arus utama dengan judul-judul beritanya mampu menggiring opini publik bahwa demo hanyalah kerusuhan. Sementara media sosial yang seharusnya bisa menjadi saluran alternatif justru dipersempit ruang gerakannya oleh pemerintah. Akibatnya, masyarakat kehilangan kesempatan untuk melihat gambaran yang lebih utuh. Selain itu, mahasiswa UNISBA dan Unpas yang terkena dampak langsung dari kerusuhan juga merasakan pembatasan ini. Mereka yang ingin berbagi pengalaman di media sosial atau melaporkan kondisi kampus sering kali mendapati unggahan mereka dibatasi atau bahkan dihapus. Padahal, komunikasi semacam itu penting untuk menyuarkan kondisi nyata di lapangan. Ketika ruang komunikasi dibatasi, mahasiswa menjadi tidak hanya korban kerusuhan secara fisik, tetapi juga korban pembungkaman suara.

Dari hasil analisis di atas, terlihat jelas bahwa pemberitaan media digital tentang demonstrasi tahun 2025 lebih menekankan pada sisi kerusakan dan kekerasan, sementara inti masalah tidak dibicarakan secara serius. Pemerintah memperkuat gambaran itu dengan membatasi arus informasi di media sosial. Kombinasi antara framing berita dan pembungkaman media ini membuat masyarakat melihat demonstrasi bukan sebagai bentuk perjuangan rakyat melawan ketidakadilan, tetapi sekadar ancaman keamanan yang harus segera diberantas. Media komunikasi pada akhirnya menjadi arena tarik-menarik antara rakyat, media, dan pemerintah. Rakyat berusaha menggunakan media sosial untuk bersuara, media arus utama sibuk menampilkan sisi kerusuhan, sementara pemerintah menggunakan kekuasaannya untuk mengendalikan informasi. Peristiwa demonstrasi 2025 membuktikan bahwa komunikasi bukan hanya soal menyampaikan pesan, tetapi juga soal siapa yang punya kuasa untuk mengatur jalannya pesan itu.

Sehingga hasil analisis menunjukkan bahwa framing media digital dan pembungkaman media sosial selama demonstrasi di Indonesia tahun 2025 telah menciptakan gambaran yang timpang di mata masyarakat. Rakyat tidak mendapat informasi yang seimbang, mahasiswa mengalami trauma sekaligus pembatasan suara, sementara pemerintah berhasil menjaga narasi tunggal demi stabilitas politik. Situasi ini mengingatkan kita bahwa kebebasan media dan kebebasan berkomunikasi adalah hal penting yang tidak boleh dikorbankan, karena tanpa keduanya demokrasi akan kehilangan makna.

Selain framing berita, pemerintah Indonesia secara aktif melakukan pembungkaman terhadap media digital dan media sosial guna mengendalikan arus informasi. Salah satu contoh paling menonjol adalah penghentian layanan live streaming TikTok pada masa puncak demonstrasi antara tanggal 15 hingga 20 Agustus 2025. TikTok Live, yang selama ini menjadi platform populer bagi warga untuk menyebarkan informasi secara real-time dari lapangan demo, dihentikan operasionalnya oleh pemerintah dengan alasan menjaga ketertiban dan mencegah penyebaran informasi yang berpotensi memicu kerusuhan lebih lanjut. Selain TikTok, pembungkaman juga dilakukan terhadap platform media sosial lain seperti Instagram dan YouTube, yang mengalami sensor konten dan pembatasan akses terhadap akun-akun yang dianggap menyebarkan narasi yang berpotensi menghasut atau mengganggu stabilitas. Selain itu, akun-akun media sosial independen dan aktivis yang meliput demonstrasi secara langsung juga mengalami pemblokiran dan penghapusan oleh pihak berwenang.

Pembungkaman media digital ini menunjukkan adanya kontrol komunikasi pemerintah yang ketat dalam mengelola wacana publik pada saat krisis sosial. Strategi pembatasan ini dimaksudkan untuk mengurangi ruang bagi narasi demonstran yang bisa menjadi alternatif perspektif terhadap pemberitaan resmi yang dominan. Dalam konteks komunikasi, langkah tersebut adalah bentuk intervensi terhadap kebebasan media dan publik untuk berkomunikasi serta mengakses informasi secara utuh. Hal ini sekaligus mengindikasikan adanya upaya pemerintah untuk mendominasi narasi publik melalui pengendalian teknologi komunikasi massa.

Kondisi ini juga menunjukkan adanya paradoks dalam penggunaan media digital sebagai alat komunikasi modern yang sangat efektif, namun sekaligus menjadi objek kontrol dan pembungkaman oleh kekuasaan. Sejalan dengan penelitian (Pitono & Dharmawan, 2025), yang menemukan bahwa framing media yang negatif dan pembungkaman media sosial secara bersamaan mengarahkan publik tidak hanya untuk melihat demonstrasi sebagai ancaman keamanan, melainkan juga membatasi ruang dialog sosial dan demokrasi yang terbuka. Dalam hal ini, media komunikasi menjadi arena perebutan makna dan wacana dengan kekuasaan yang berusaha menjaga stabilitas politik melalui pembatasan kebebasan informasi.

Framing ini selaras dengan teori komunikasi Robert N. Entman yang menjelaskan bahwa framing media berfungsi untuk menonjolkan aspek tertentu dari sebuah isu sambil mengabaikan aspek lain, sehingga membentuk perspektif atau interpretasi tertentu pada audiens. Berdasarkan teori framing komunikasi Robert N. Entman, analisis hasil di atas dapat dikaitkan dengan proses *framing* media dimana empat fungsi utama, yaitu 1) media menentukan masalah spesifik yang ingin ditonjolkan (*define a specific problem*), dalam hal ini adalah kekerasan dan kerusuhan dalam demonstrasi; 2) media mendiagnosis penyebab masalah (*diagnose a cause of the problem*), dengan menysar pihak demonstran sebagai biang keladi kerusuhan dan

kekacauan; 3) media membuat penilaian moral atas masalah tersebut (*make a moral judgment about the problem*), yakni menempatkan aksi demonstrasi sebagai tindakan yang mengancam ketertiban dan keamanan publik; dan 4) media menyarankan solusi (*suggest remedies to the problem*), yaitu mendukung pembatasan informasi dan tindakan tegas pemerintah untuk meredam demonstrasi. Melalui keempat proses ini, media secara efektif membentuk interpretasi publik yang condong pada penggambaran negatif tanpa mengupas akar persoalan secara mendalam. Hal ini diperparah dengan intervensi pemerintah dalam pembungkaman media sosial yang menutup ruang alternatif bagi suara-suara yang mencoba menghadirkan perspektif lain. Akibatnya, media komunikasi berubah menjadi arena perebutan makna antara kekuasaan dan masyarakat, di mana kebebasan berkomunikasi terancam dan demokrasi mengalami erosi mendasar karena ketidakseimbangan informasi dan tekanan kontrol politik yang kuat.

Framing pemberitaan di media digital dan pembungkaman media sosial selama demonstrasi di Indonesia 2025 mencerminkan dinamika kuat antara media, kekuasaan, dan masyarakat dalam kaitannya dengan politik dan sosial yang kompleks. Pemberitaan yang lebih dominan menampilkan kerusuhan dan anarkisme, sedangkan pembungkaman media digital membatasi eksplorasi isu-isu mendalam dan kritik sosial. Fenomena ini relevan untuk ditinjau ulang demi mendorong praktik jurnalistik yang lebih berimbang dan kebijakan komunikasi yang menghargai kebebasan berpendapat tanpa mengancam ketertiban sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa framing media digital dalam pemberitaan demonstrasi tahun 2025 lebih menonjolkan aspek kerusuhan, kekerasan, dan kerugian material, sehingga menutupi akar persoalan yang melatarbelakangi aksi massa. Pemerintah memperkuat narasi ini melalui pembatasan media sosial seperti penghentian TikTok Live dan sensor konten di Instagram maupun YouTube. Sesuai teori framing Robert N. Entman, media dalam hal ini mendefinisikan masalah (kerusuhan), mendiagnosis penyebab (demonstrasi sebagai biang kerok), membuat penilaian moral (demo dianggap anarkis dan mengancam stabilitas), serta memberikan solusi (mendukung tindakan tegas pemerintah). Dengan demikian, framing media dan intervensi pemerintah menciptakan persepsi publik yang timpang dan mengikis nilai kebebasan berekspresi dalam demokrasi.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak framing dan pembungkaman media digital tidak hanya memengaruhi cara masyarakat memandang demonstrasi, tetapi juga mempersempit ruang komunikasi publik yang seharusnya terbuka. Mahasiswa, masyarakat sipil, dan jurnalis independen yang mencoba menghadirkan perspektif berbeda justru terhambat oleh sensor dan pemblokiran akun. Hal ini membuktikan bahwa media digital, yang semestinya menjadi ruang demokratisasi informasi, justru

menjadi arena perebutan makna antara kekuasaan dan rakyat. Dengan begitu, fenomena ini menegaskan bahwa kebebasan media dan keterbukaan komunikasi adalah syarat mutlak bagi demokrasi yang sehat.

Oleh karena itu, agar tidak terjadi ketimpangan informasi dan erosi demokrasi, disarankan media digital menerapkan praktik jurnalistik yang berimbang serta pemerintah mengurangi pembatasan media sosial dengan mengedepankan transparansi. Selain itu, masyarakat perlu meningkatkan literasi media agar mampu menilai informasi secara kritis sehingga ruang komunikasi yang sehat dapat terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Angin, W. A. D. P., & Surbakti, P. B. (2024). Analisis Framing pada Teks Editorial Tentang Pemilu 2024: Studi Kasus pada Media Online Kompas.Com. *Harmoni: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial*, 2(4), 288–295.
- Apriyani, T. (2021). Peran Sosial Media pada Gerakan Protes Massa Aksi dan Demokrasi Baru di Era Digital. *Kalijaga Journal of Communication*, 3(1), 17–30.
- Channelnewsasia.com. (2025). *Demonstran di Indonesia mengancam tunjangan perumahan baru sebesar US\$3.000 per bulan untuk anggota parlemen, yang membelanya sebagai “perhitungan yang cermat.”* <https://www.channelnewsasia.com/asia/indonesia-protest-jakarta-senayan-lawmakers-pay-5312826>
- Fadila, R. N., Rahma, M. A., & Trisnawati, T. (2021). Media, Komunikasi dan Jurnalistik di Era Digital. In *Kompasiana*. PT. Penerbit Qriset Indonesia.
- Iriansyah, M. N. (2025). “Demo Mahasiswa Sudah Kelewat Batas”: Pengaruh Pemberitaan Media dan Persepsi Publik Terhadap Ketahanan Sosial-Budaya di Kota Makassar. *Responsive : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik.*, 8(1), 42–55.
- JABAR, I. T. (2025). *Rektor Unisba: Kericuhan di Kampus Tamansari Disusupi Gerombolan Tak Dikenal.* <https://jabar.idntimes.com/news/jawa-barat/rektor-unisba-kericuhan-di-tamansari-disusupi-gerombolan-tak-dikenal-00-9y7yl-51vtnl>
- Kamelia, F., & Nusa, L. (2018). Bingkai Media Online Coverage of Indonesia 's Debt in an Online. *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(1), 10–16. <https://doi.org/10.21070/kanal.v>
- Kompas.com. (2025). *Demo Ricuh di Unisba, Mahasiswa dan Polisi Ungkap Kronologi Berbeda.* <https://www.kompas.com/lampung/read/2025/09/02/164500888/demo-ricuh-di-unisba-mahasiswa-dan-polisi-ungkap-kronologi-berbeda>
- Lim, M. (2024). Social Media and Politics in Southeast Asia. In *Cambridge University Press*.

- Mappiwali, H. (2025). Massa Demo Bakar Gedung DPRD Makassar, 3 Orang Tewas. *Detiksumut*. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-8087124/massa-demo-bakar-gedung-dprd-makassar-3-orang-tewas>
- Muzakkir. (2021). Analisis Framing dalam Pemberitaan Media. *SOURCE : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(2), 183–196.
- Nelwan, N. A., Randang, J. L. K., & Lotulung, L. J. H. (2023). Analisis Framing Pemberitaan Kontroversi Pengaturan Pengeras Suara Masjid Pada Media Online Detik.Com Dan Republika.Co.Id. *Jurnal Acta Diurna Komunikasi*, 5(1), 1–6.
- Ningrat, S. R. C., & Nulhaqim, S. A. (2023). Pasal Karet UU ITE dan Peyelesaian Konflik Digital di Indonesia. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 4(2), 38–52.
- Nurhayati, E. S., & Laksmi. (2023). Analisis Framing Model Entman pada Pemberitaan Kebocoran Data Aplikasi Peduli Lindungi oleh Media Online. *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, Dan Informasi*, 7(4), 573–590.
- Nurrisa, F., Hermina, D., & Norlaila. (2025). Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, dan Analisis Data. *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTTP)*, 02(03), 793–800.
- Pitono, & Dharmawan, A. (2025). Analisis Framing Media Narasi.tv dan Viva.co.id Dalam Pemberitaan Demonstrasi Peringatan Darurat Menolak Revisi Undang-Undang Pilkada 2024. *The Commercium*, 9(3), 27–37.
- RFI.com. (2025). *Rumah Menteri Keuangan Indonesia dijarah saat kemarahan protes meningkat*. <https://www.rfi.fr/en/international-news/20250831-indonesian-finance-minister-s-home-looted-as-protest-anger-grows>
- Romdani. (2025). Kerusakan Meluas setelah Aksi Demo, dari Jakarta Timur hingga Bandung. *Katimpost.Jawapos.Com*. <https://kaltimpost.jawapos.com/utama/2386506335/kerusakan-meluas-setelah-aksi-demo-dari-jakarta-timur-hingga-bandung>
- Sari, M. A. (2025). Deretan Aksi Penjarahan di Rumah Anggota DPR, Massa Ambil Barang Elektronik hingga Kucing. *Tribun Papua.Co*. <https://papua.tribunnews.com/news/118586/deretan-aksi-penjarahan-di-rumah-anggota-dpr-massa-ambil-barang-elektronik-hingga-kucing>
- Sari, Z., Sakinah, & Mufaro'ah. (2024). Membangun Hubungan yang Positif Melalui Komunikasi yang Efektif. *Khirani: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2(4), 242–253.
- Tempo.co. (2025). *Marak Demonstrasi, Warganet Keluhkan Sulit Mengunggah Ulang Konten di Instagram*. <https://www.tempo.co/politik/marak-demonstrasi-warganet-keluhkan-sulit-mengunggah-ulang-konten-di-instagram-2064615>

Tufekci, Z. (2017). Twitter and tear gas: The power and fragility of networked protest. In *Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest*. <https://doi.org/10.5325/bustan.11.1.0077>

Ulfa, Rahmi, & Yana, S. (2024). Pengaruh Media Sosial Dalam Transformasi Pemasaran Digital. *JUPEIS: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(3), 11–17.

Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910.

Zuniananta, L. E. (2020). Penggunaan Media Sosial sebagai Media Komunikasi Informasi di Perpustakaan. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 10(4), 37–42.